

Merajut KeIndonesiaan

Oleh : Gatut Priyowidodo, Ph.D

Kosmopolitanisme menurut Naisbitt dan Aburdene (1990) bukan saja mengalirkan spirit berpikir global, tetapi juga semakin mengeraskan identitas primordial dan sektoral. Fakta ini disebabkan ternyata ketika manusia masuk dalam peradaban global tanpa batas, melekat pada alam bawah sadarnya kerinduan akan ikatan-ikatan lokal. Sisi paradoks efek perubahan peradaban dari masyarakat industri ke masyarakat informasi.

Pada konteks seperti itu, rasanya tepat menempatkan kebenaran premis di atas dengan situasi yang terjadi hari-hari ini di Indonesia. Beberapa perilaku tindak kekerasan disepanjang tahun 2016 ini sedikit banyak selalu berkisar pada penguatan identitas primordial yang dikemas agak intoleran dan konfrontatif.

Hampir dipenghujung tahun tepatnya tanggal 4 November 2016, demonstrasi yang mengusung tema Bela Islam dan diikuti lebih dari 100 ribu peserta juga berakhir rusuh. Aksi damai yang menjadi target awal, ternyata berujung pada tindakan destruktif. Untung eskalasinya dapat diblokir, sehingga tidak merembet kemana-mana.

Atas semua peristiwa yang tidak kondusif dan memancing isu SARA meletup, muncul pertanyaan mendasar, apakah 'menjadi Indonesia' bagi seluruh clemen bangsa ini belum tuntas diterima? Apa yang menurut istilah Will Kymlicka (1995) sebagai 'multicultural citizenship' adalah sebuah proses penuntasan yang seolah belum berujung. Pertanyaannya, sejatinya konstruksi masyarakat multikultur yang bagaimanakah, yang ingin ditata oleh bangsa ini ke depan?

Kesepakatan Awal

Indonesia adalah produk kesepakatan hukum dan politik. Secara hukum dan politik mungkin sudah dianggap selesai. Tetapi tidak atau tepatnya belum secara sosial, ekonomi dan budaya. Masih banyak pekerjaan rumah yang terus secara bertahap hendak diselesaikan. Kompleksitas tiga masalah tersebut, tidak hanya tanggung jawab kelompok mayoritas tetapi harus terdistribusi ke semua lapis masyarakat. Itulah sebabnya agak tidak masuk nalar bila ada satu kelompok memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain. Tidak saja itu bentuk tirani mayoritas tetapi juga upaya sistematis melenyapkan identitas pihak lain yang bermuara pada kesewenang-wenangan.

Apapun alasannya pluralitas sosial, ekonomi, budaya, suku, agama, ras dan antargolongan harus tetap diletakkan sebagai kekayaan

berbangsa. *The majority takes all* atau *the biggest takes all*, harus dicampakan karena tidak saja mengkianati keluhuran bangsa tetapi melestarikan luka yang tak pernah kunjung sembuh.

Stigma sejarah yang menempatkan kaum keturunan Arab, India dan Cina lebih mulia dari kaum Bumiputera tak sepatasnya terus dileluri. Namun faktanya hingga 70 tahun lebih Indonesia merdeka, mereka justru mengukuhkan diri sebagai sebuah 'enclave community'. Akulturasi lintas kaum memang berhasil sepanjang berkehis soal budaya, ekonomi atau sosial. Tetapi manakala sudah bersinggungan dengan agama, sesuatu yang tampaknya sangat sederhana berubah menjadi sangar dan menakutkan. Kegundahan yang semula bakal mudah dinetralisir, tanpa disangka menjadi liar dan tak mudah lagi dikontrol.

Kasus Tanjungbalai (Sumut) yang terjadi 30 Juli 2016, bukan sekedar kerusuhan disertai pengerusakan 2 **wihara**, 8 **kelen-teng**, dan 1 yasanan sosial, tetapi pesan yang ingin disampaikan lebih dari itu. Pemicunya ada seorang warga yang menginginkan suara **ad-zan** dari **pengeras suara Masjid Al-Makshum** yang terletak di Jalan Karya, Kota Tanjungbalai, diperkecil, lantaran mengganggu aktivitas keluarga di rumahnya. Pihak pengurus masjid sempat mendatangi rumah warga tersebut sesuai salat Isya, namun karena situasi yang mulai tidak kondusif, kedua belah pihak dipisahkan dan diamankan oleh kepolisian setempat. Tersiarlah aneka kabar, yang kemudian memancing massa bergerak dan berbuat anarkis.

Begitu pula demo 4 November 2016, yang dijadwalkan berakhir jam 18.00 ternyata tidak mau bubar. Ujungnya terjadi pula kerusuhan, penjarahan, 350 orang terluka dan 15 provokator diamankan polisi (*detiknews*, 5/11/2016). Sekali lagi, tuntutan kepada Ahok agar diadili karena telah menyinggung perasaan umat Islam hanyalah pemicu awal. Sejatinya lebih dari itu, demo telah dimanifestasikan sebagai cara mengirim pesan simbolik untuk sesuatu yang lebih besar dan dasyat.

KeIndonesiaan yang belum tuntas, selalu saja mudah tersulut oleh isu-isu kontroversi. Nalar yang semestinya dipandu ajar yang benar dan rasional berhasil disublimasi pikiran-pikiran sesat yang subyektif dan penuh emosionalitas. Lalu apa yang dimaksud sesuatu yang lebih besar dan dasyat itu? Tidak lain, adalah rasa kuatir dan kegagaman bumiputera yang merupakan mayoritas bangsa. Jangan-jangan negeri yang kaya ini pada akhirnya jatuh



dan digadaikan oleh sekelompok elit yang berasal dari minoritas.

Gaya komunikasi Ahok mengemukakan bahwa selaku penguasa Jakarta seolah-olah sedang menjalankan agenda terselubung yang menjadi kekuatan tersebut. Terlebih kegagaman itu dengan mudah dikonfirmasi melalui kata-kata yang kasar, spontan, tanpa unggah-ungguh dan tidak cermat dalam diksi. Ditambah lagi, kepemimpinan yang suka menggosur, main pecat dan melabrak siapapun yang tidak patuh aturan, menjadi titik kulminasi agar kepemimpinan Ahok segera disudahi.

Bahwa di era kepemimpinan Aho Jakarta lebih baik, bukan di situ masalahnya. Tetapi mempertontonkan arogansi kekuasaan diarena publik menjadi kegagaman banyak pihak seolah-olah tidak ada orang lain yang lebih kapabel dari dia. Ironisnya kegagaman itu banyak disuarakan warga non Jakarta dan tidak gayung bersambut dengan sebagian besar warga Jakarta sendiri. Maka ketika ada pemantik kecil, diolahlah isu itu seolah menjadi isu nasional atas nama penistaan agama.

Tuntutan agar Ahok ditangkap dan dipenjarakan, menjadi komoditas yang laku dipasarkan. Publik non Jakarta yang sudah meradang didatangkan. Seolah Ahok adalah orang yang amat bersalah, meskipun ia sendiri sudah meminta maaf. Uraian itu intinya satu, Ahok diskenariokan tamat karir politiknya di Jakarta. Dengan begitu tamat pula obsesinya untuk melaju ke RI 1 atau RI 2.

Mengelola negara dengan main paksa seperti itu, tentu jauh dari kesepakatan awal dan cita-cita luhur bapak bangsa mendirikan negara ini mula-mula. Apapun alasannya minoritas ataupun mayoritas bangsa ini, tidak boleh mengklaim sebagai pemilik sah satu-satunya rumah bangsa yang bernama Indonesia ini. Indonesia tetap milik besama meskipun secara etnisitas, agama, ras, antargolongan, stratifikasi sosial, budaya semuanya berbeda. Justru

melalui keragaman itulah Indonesia itu ada.

Pelajaran Berharga

Negeri multikultur, multi etnik, multi kepercayaan dan dihuni lebih dari 250 juta, memang serba tidak mudah mengelolanya. Terlebih jika diurut persoalan bangsa yang multikompleks, tentu bukan saja membutuhkan energi yang luarbiasa besarnya tetapi juga luarbiasa berat dan luas jangkauannya.

Ketika Jakarta yang serba kosmopolitan dan warganya sangat melek media, standar hidup tidak bisa disamakan dengan mereka yang di kampung dengan segala keterbatasannya. Bukannya negara abai dan melakukan pembiaran terhadap kesenjangan yang ada tersebut, tetapi memang sejak awal titik berangkat penataan pembangunan memang tidak sama.

Taruhlah sebagai misal, ketika rerata pendidikan orang kota sudah SMA keatas dan di kampung masih SMP kebawah dan masih juga ditemui yang putus sekolah, ini adalah problem faktual yang harus dipecahkan. Tetapi penyelesaianpun tidak bisa seketika tetap bertahap. Apa dampak ikutan bila rerata jenjang pendidikan tidak sama kota-desa, kabupaten-kota, provinsi A-provinsi B atau bahkan Jawa-luar Jawa?

Dampak langsungnya adalah pengetahuan serta daya analisis terhadap hilir-mudik informasi juga tidak sama. Ironisnya sebagai sebuah bangsa yang sudah lebih dari tujuh dasa warsa merdeka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya masih berkisar angka 69,55. IPM setidaknya diukur dari kualitas dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Khusus dimensi pendidikan misalnya harapan lama sekolah di Indonesia telah mencapai 12,55. Artinya, anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D-1. Tapi masalah di lapangannya adalah distribusinya yang sangat tidak merata. Bukan saja karena kondisi geografis tetapi juga kesenjangan ekonomi yang sangat lebar antara kota dan desa apalagi Jawa dan luar Jawa.

Itulah sebabnya tidak mengherankan, jika mereka yang berpendidikan rendah dengan akses informasi yang juga serba terbatas dengan mudahnya terprovokasi oleh pihak lain. Mereka dengan polosnya menerima informasi apapun itu tanpa kemampuan analisis yang memadai. Menyedihiannya, keterbatasan itu malah semaksimal mungkin dimanfaatkan para tokoh atupun 'opinion leader' sebagai massa yang dengan seandainya

diperdaya demi kepentingan sesaat. Mereka memetik keuntungan ekonomi atau politik, rakyat kebanyakan yang menjadi korban.

Peribahasa, *tinggal glanggang colong playu* artinya sekarang ini banyak aktor yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Ketika rakyat sudah berhasil diprovokasi seolah itu sebuah kemenangan. Tetapi jika mereka menjadi korban, tidak ada yang secara kesatria unjuk gigi mengambil tanggungjawab.

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 inipun Indonesia juga masih belum terbebas dari ulah sebagean kelompok anak bangsa yang sangat gemar menabur benih pertikaian. Bagi mereka menyemai benih permusuhan dan tindak kekerasan seakan kebanggaan yang mesti ditularkan. Mimpinya satu, Indonesia harus bisa diubah sesuai dengan keinginan dan skenario yang mereka desain. Bahwa akan terjadi pertumpahan darah itulah jihad yang harus mereka lakukan demi mewujudkan cita-citanya.

Maka menghadapi gerakan radikal dan semangat militansi yang salah seperti itu, negara tidak boleh lemah. Pemimpin negara harus kuat dan tegas. Tidak boleh ada toleransi sedikitpun terhadap upaya mengoyak rajutan Indonesia yang bhineka ini. Siapapun mereka yang mendorong perongrongan keIndonesiaan harus disikat habis. Ujaran kebencian yang memancing kerusuhan sekecil apapun mesti segera ditindak. Indonesia cukup memiliki pengalaman dan pelajaran berharga tahun 1966 dan 1998 yang memilukan.

Sejarah tragis seperti itu hendaknya jangan diulang. Terlalu besar resikonya. Indonesia kedepan harus lebih maju, beradab dan toleran dalam kepelbagaian. Sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran keragaman itu sepatasnya diingat pandangan filsuf Perancis, Emmanuel Levinas (1906-1995). Lavinias, dalam teori tentang penampakan wajah (*The face of the other*) mengatakan bahwa penampakan wajah bukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Yang lain itu berbeda dari aku. Namun demikian, hubungan aku dengan yang lain tidak akan melahirkan kekerasan. Kehadiran yang lain akan membuahkan kedamaian dan menumbuhkan kultur positif dalam kehidupan (Levinas, 1979).

*Gatut Priyowidodo, Ph.D
Ketua Pusat Kajian Komunikasi
Petra (PKKP) dan Dosen Tetap
Program Studi Ilmu Komunikasi
UK Petra Surabaya.